

PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DI SMP NEGERI 1 PEDAN KLATEN

NASKAH PUBLIKASI

**Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



Oleh :

**Suharjo Bawono
NIM : Q 100110090**

**MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DI SMP NEGERI 1 PEDAN KLATEN

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

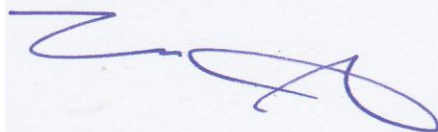
Suharjo Bawono
NIM : Q 100110090

Telah disetujui oleh Pembimbing

Pada Tanggal :

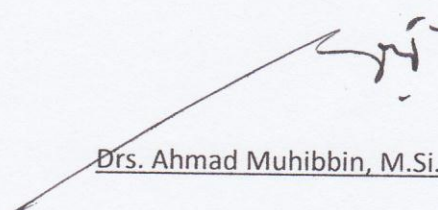
.....

Pembimbing I



Prof. Dr. Sutama, M.Pd.

Pembimbing II



Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si.

PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DI SMP NEGERI 1 PEDAN KLATEN

Oleh :

Suharjo Bawono¹, Prof. Dr. Sutama, M.Pd², Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si³

¹⁾ Mahasiswa Program Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana UMS Surakarta, ²⁾ Dosen Program Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana UMS Surakarta; ³⁾ Dosen Program Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana UMS Surakarta.

Abstract

Purpose of research is description about : 1) levying expansion of supporting facilities for infrastructure; 2) usage expansion of supporting facilities for infrastructure, and 3) treatment expansion of supporting facilities for infrastructure. Research type is qualitative. Research approach of phenomenology. Research subject is headmaster and teacher Method data collecting applies in-depth interview, observation and documentation. Data analytical technique applies triangulation. Result of research that is : 1) Levying expansion of supporting facilities for infrastructure in Junior High School State One Pedan Klaten effective school is responsive to change of education delivery program, and minimum must provide balmy physical area, safe, safe, easy to be accessed, addition of ten computer units for computer laboratory, eight units for language laboratory, one units for administration, etcetera; 2) Keeping is custody activity or preventive from damage a goods, so that the goods its(the condition is good and ready to be applied. Keeping started from goods usage, that is by the way of precautions in using it, including cleaning all equipment and study media and white colours; 3) Keeping having the character of special must be done by officer having expertise as according to the goods type, keeping expansion of supporting facilities for school infrastructure can be affirmed with internal cooperation model and external. Internally, optimal of performance member of school, and externally maximal stakeholders, especially parent or student sponsor, school committee, corporate world, and government, including back up data initially one months once is executed one weeks once.

Keyword : supporting facilities for infrastructure..

Pendahuluan

Pengembangan sekolah sangat penting manfaatnya bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk penyusunan rencana pendidikan di daerahnya. Semua RPS di Kabupaten/Kota dapat dijadikan dasar bagi penyusunan Pengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota (PPK). Dengan cara ini, RPPK akan lebih relevan dengan kebutuhan setiap sekolah di daerahnya. Demikian manfaat bagi Dinas Pendidikan Tingkat Propinsi. Dalam membuat Pengembangan Pendidikan Propinsi (PPP) harus didasarkan atas semua RPPK yang ada di daerahnya. Demikian juga pada tingkat nasional, PPP dapat digunakan sebagai informasi bagi

penyusunan Pengembangan Pendidikan Nasional (PPN).

Pengembangan sekolah merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah. RPS berfungsi untuk memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka menuju tujuan sekolah yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), mulai sekarang setiap sekolah pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus memenuhi SNP tersebut. Salah satu upaya untuk mencapai SNP, setiap sekolah wajib membuat pengembangan sekolah.

Pengembangan sekolah wajib dibuat oleh semua SMP, baik yang termasuk kelompok rintisan, potensial, nasional maupun internasional. Pengembangan sekolah harus dimiliki oleh setiap sekolah sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik untuk jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) maupun pendek (satu tahun). Diharapkan, semua jenis kelompok sekolah menggunakan format Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang sama. Perbedaannya terletak pada isi, kedalaman, dan luasan atau cakupan program sesuai dengan kondisi sekolah dan tuntutan masyarakat sekitarnya. Perbedaan lainnya adalah lama waktu pencapaian SNP. Bagi sekolah yang memiliki potensi lebih tinggi dari pada sekolah lain akan dapat mencapai SNP relatif lebih cepat. Demikian sebaliknya, bagi sekolah yang miskin potensi akan lebih lamban dalam mencapai SNP. Namun demikian harapannya adalah semua sekolah tersebut dalam kurun waktu tertentu mencapai SNP yang ditentukan oleh pemerintah.

SNP yang harus dicapai oleh tiap sekolah tersebut meliputi standar kelulusan, kurikulum, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan. Sangat dimungkinkan suatu sekolah telah memenuhi standar kelulusan tetapi fasilitasnya belum standar atau sebaliknya. Suatu sekolah sekarang kondisinya kurang dalam standar fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, buku, dan sebagainya dan secara bertahap akan dipenuhi selama kurun waktu tertentu. Sementara itu kondisi gurunya telah memenuhi SNP. Begitu seterusnya pada aspek-aspek lainnya. Suatu sekolah dimungkinkan dalam waktu lima tahun mampu mencapai SNP, sementara itu terdapat sekolah untuk mencapai SNP memerlukan waktu 15 tahun. Semua itu sangat tergantung kepada unsur-unsur yang ada di sekolah itu sendiri. Dan apabila suatu sekolah telah memenuhi SNP, maka diharapkan akan mampu menyelenggarakan pendidikan secara efektif, efisien, berkualitas, relevan, dan mampu mendukung tercapainya pemerataan pendidikan bagi masyarakat luas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan

nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi nyata di SMP Negeri 1 Pedan Klaten memiliki sarana prasarana yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, laboratorium IPA, laboratorium computer, mushola/ tempat ibadah, alat peraga, media pembelajaran berbasis computer, dan sebagainya. Lebih jauh perlu diinventarisasi secara keseluruhan, apakah memang sudah memadai atau sudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.

Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan commitment (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang handal dan kesemuanya itu di dukung sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi.

Bila salah satu hal diatas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal. Dengan demikian harus ada keseimbangan antara komponen-komponen di atas. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, diperlukan pengelola yang mengerti dan memahami prinsip-prinsip dalam pegelolaan sarana prasarana sekolah untuk tercapainya tujuan pendidikan tertentu.

Ada lima factor yang harus asa pada proses belajar mengajar yaitu ; guru, murid, tujuan, materi dan waktu. Ketidak adanya salah satu dari factor tersebut saja, maka tidak mungkin terjadi proses belakar mengajar. Dengan lima factor tersebut proses belajar mengajar walau pun kadang-kadang dengan hasil yang minimal pula. Hasil tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana penunjang, yaitu fasilitas/sarana dan prasarana pendidikan.

Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tdi antaranya, sebagai berikut,

Fokus penelitian ini adalah "Pengembangan Sarana Prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten". Dari fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga subfokus sebagai berikut: 1) Bagaimana pengembangan pengadaan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten?' 2) Bagaimana pengembangan penggunaan sarana

prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten?; 3) Bagaimana pengembangan perawatan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten?

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan tentang pengembangan sarana prasarana sekolah, sedangkan tujuan khusus, yaitu : 1) Mendeskripsikan tentang pengembangan pengadaan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten; 2) Mendeskripsikan pengembangan penggunaan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten; dan 3) Mendeskripsikan pengembangan perawatan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten.

Kajian Teori

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar (Mulyono, 2008: 184).

Sarana dan prasarana pendidikan, meliputi : pembangunan ruang belajar, renovasi dan rehabilitasi ruang belajar beserta perangkat pendukungnya, ruang laboratorium, perpustakaan, komputer, pusat sumber belajar, dan termasuk rumah guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, wc guru dan murid (Isjoni, 2006: 23).

Sasaran atau tujuan jangka pendek (tujuan situasional) dari pengembangan sarana prasarana adalah terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan (Rohiat, 2010: 90).

Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana (Sudibyo, 2007: 1).

Hasil sasaran pengembangan sarana dan prasarana antara lain : terwujudnya perbaikan/ pengadaan/ pembangunan gedung, laboratorium dan ruang-ruang sesuai kebutuhan sekolah, terwujudnya perbaikan/ pengadaan/ penambahan peralatan praktik IPA, komputer, olahraga, kesenian, keterampilan, dan lainlain (Rohiat, 2010: 91).

Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan. Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan (Sudibyo, 2007: 17).

Untuk dapat merancang kebutuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu komponen dalam sistem sekolah, perlu dijabarkan terlebih dahulu visi, misi, sasaran, fungsi dan tujuan pendidikan sekolah tersebut. Pengadaan sarana dan

prasarana merupakan konsekuensi dari rumusan fungsi dan tujuan pendidikan, aspek mana yang utamanya mau dikembangkan. Satu macam model tidak mungkin meliputi segala macam keperluan untuk pengembangan potensi optimal setiap anak-didik. Kondisi lingkungan dan karakteristik anak-didik perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan model. Usaha untuk mengembangkan pedoman pengadaan sarana dan prasarana secara rinci tidak mungkin hanya dilaksanakan dari belakang meja. Diperlukan kegiatan pengkajian lapangan, studi banding, serta dilakukan pembahasan secara konseptual dan operasional dengan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Spesifikasi teknis untuk masing-masing sarana dan prasarana perlu dipersiapkan secara terperinci sesuai keperluan dan kualitasnya. Pengalaman selama ini pengadaan sarana dan prasarana banyak yang mubazir karena berorientasi pada harga yang murah (Yusufhadi, 2010: 5).

Standar prasarana pendidikan mencakup persyaratan minimal dan wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan lahan, tentang, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tlima berolahraga, tlima beribadah, tlima bermain, tlima berkreasi, dan ruang/tlima lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana pendidikan mencakup persyaratan minimal tentang perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Depdiknas, 2006: 14).

Adapun program-program dan kegiatan yang dapat dikembangkan mengenai standar prasarana dan sarana baik secara kuantitas maupun kualitas antara lain: 1) Peningkatan dan pengembangan serta inovasi-inovasi media pembelajaran untuk semua mata pelajaran; 2) Peningkatan dan pengembangan serta inovasi-inovasi peralatan pembelajaran untuk semua mata pelajaran; 3) Pengembangan prasarana (ruang, laboratorium) pendidikan dan atau pembelajaran; 4) Penciptaan atau pengembangan lingkungan belajar yang kondusif; 5) Peningkatan dan pengembangan peralatan laboratorium komputer, IPA, Bahasa, dan laboratorium lainnya; 6) Pengembangan jaringan internet, baik bagi peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan; 7) Pengembangan atau peningkatan peralatan/bahan perawatan sarana dan prasarana pendidikan, dan 8) Pengembangan peralatan dan inovasi-inovasi pusat-pusat sumber belajar (Depdiknas, 2006: 14).

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Pedan Klaten. Penelitian ini menyajikan data-data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian tanpa ada intervensi dari peneliti. Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2005: 60). Pendekatan penelitian fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan

dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata, hasil wawancara, observasi, hasil analisis dan dokumentasi atau semua catatan yang terarsip di sekolah dan data sejenis lainnya seperti photo, visi misi sekolah yang mendukung penelitian ini. Data hasil wawancara diperoleh dari kepala sekolah, ketua komite, dan guru. Jenis data dari hasil observasi berupa catatan lapangan tentang pengembangan sarana prasarana sekolah. Sumber data penelitian adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan dengan informan, sedangkan sumber data sekunder berupa hasil studi dokumen yang diperoleh dalam penelitian. Untuk penentuan informan bahwa setelah peneliti melakukan *prasurvey* sebagai studi pendahuluan, peneliti menetapkan pihak-pihak yang menjadi subjek narasumber yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Pemilihan *informan* dilakukan berdasarkan pertimbangan pada kemampuan mereka untuk memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, narasumbernya, yaitu : kepala sekolah, dan guru. Teknik menggunakan langkah langkah analisis data selama pengumpulan data dan analisis data setelah pengumpulan data . Keabsahan data menggunakan pengamatan secara terus menerus, triangulasi data. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, untuk mencari atau memperoleh standar kepercayaan data yang diperoleh dengan jalan melakukan pengecekan data, cek ulang, dan cek silang pada dua atau lebih informasi, dan membicarakan dengan orang lain (rekan-rekan sejawat yang banyak mengetahui dan memahami masalah yang diteliti). Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini juga mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

Pembahasan

1. Pengembangan pengadaan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten

Pengadaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan, atau sebagai proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Pengembangan pengadaan sarana prasarana mencakup kebutuhan sekolah, seperti pengadaan komputer untuk laboratorium komputer yang semula hanya 10 unit, ada penambahan 10 unit, laboratorium bahasa yang semula 12 unit ada penambahan 8 unit, pengadaan komputer untuk back up data yang semula hanya satu unit, ada penambahan 1 unit, dan peralatan laboratorium IPA.

Sarana dan prasarana pendidikan, meliputi : pembangunan ruang belajar, renovasi dan rehabilitasi ruang belajar beserta perangkat pendukungnya, ruang laboratorium, perpustakaan, komputer, pusat sumber belajar, dan termasuk rumah guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, wc guru dan murid (Isjoni, 2006: 23).

Sekolah merupakan sistem yang memiliki tujuan, dan berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, serangkaian masalah dapat muncul. Masalah-masalah itu dapat dikelompokkan sesuai dengan tugas-tugas administratif yang menjadi tanggung jawab administrator sekolah, sehingga

merupakan substansi tugas- tugas administratif kepala sekolah selaku administrator. Di antaranya adalah tugas yang dikelompokkan menjadi substansi perlengkapan sekolah.

Bridget, et all (2007:10), tentang *“Evaluation of the Primary Schools Whiteboard Expansion Project-summary report”*, mengemukakan bahwa *“The Primary Schools Whiteboard Project provides considerable evidence of the value of interactive whiteboards in terms of increased pupil motivation and teachers’ job satisfaction. There is also evidence of a positive impact on attainment when pupils have been taught with an interactive whiteboard for at least two years, particularly for those of both genders with average or high prior attainment. We therefore recommend that consideration should certainly be given to installing interactive whiteboards in all classrooms in all primary schools which choose to have them. Priority should be given to installing interactive whiteboards in all classrooms in a school as this enables teachers to learn together and ensures continuity for pupils as they move through the school”*.

Penelitian tersebut di atas focus pada kegiatan siswa dan guru di Sekolah Dasar (SD) yang memanfaatkan sarana prasarana sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah, dapat memotivasi kegiatan pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan kepuasan bagi siswa dan kinerja guru. Pertimbangan lain pemanfaatan sarana prasarana adalah menumbuhkan interaksi di dalam kelas dan kesinambungannya dalam pengembangan di sekolah.

Salah satu tugas utama kepala sekolah dalam pengelolaan sarana prasarana ialah bersama-sama dengan staf menyusun daftar kebutuhan mereka akan alat-alat sarana tersebut dan mempersiapkan perkiraan tahunan untuk diusahakan penyediaannya. Kemudian menyimpan dan memelihara serta mendistribusikan kepada guru-guru yang bersangkutan, dan menginventarisasi alat-alat atau sarana tersebut pada akhir tahun pelajaran.

Mengelola dan mengembangkan sarana prasarana sekolah di SMP Negeri 1 Pedan Klaten menjadi maju dan bermutu terletak pada mutu warga sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, masyarakat serta iklim dan kultur disekitarnya. Untuk mengelola sekolah, diperlukan kepala sekolah yang dapat mengatur seluruh potensi sekolah agar berfungsi dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu kepada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut: Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta, bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak

yang dituju, dan setelah dikunjungi dan disetujui maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut

Peran yang dilakukan oleh kepala SMP Negeri 1 Pedan Klaten khususnya untuk mengembangkan sarana prasarana adalah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator bagi seluruh personil sekolah. Peran tersebut dijalankan semaksimal mungkin dengan penuh tanggungjawab supaya semua perangkat sekolah dapat berjalan bersama-sama mengembangkan sekolah Amanasak, terutama di bidang sarana prasarana.(2) Upaya kepala sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikan di Amanasak Pattani, adalah dengan mengefisienkan pengeluaran sekolah, menciptakan kerjasama dengan masyarakat, membuat sistem pemeliharaan sarana prasarana, dan membentuk karakter civitas akademik untuk tetap memelihara dan menjaga sarana prasarana sekolah.

Pembenahan infrastruktur dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan pun, lanjut Anas, masih akan difokuskan guna mendukung program pendidikan sembilan tahun. Oleh karenanya pembenahan dan pengembangan akan lebih dititik beratkan pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP)/ Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan salah satu bidang kajian manajemen sekolah atau manajemen pendidikan dan sekaligus menjadi tugas pokok manajer sekolah atau kepala sekolah.

Manajemen sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana sekolah menurut Ibrahim adalah semua perangkat peraturan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Menurut pakar pendidikan mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan yang ditinjau dari beberapa sudut pandang. Pertama, ditinjau dari habis dan tidaknya di pakai, kedua, di tinjau dari bergerak dan tidaknya, ketiga, ditinjau dari hubungan proses belajar mengajar. Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana, yaitu : pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah atau bantuan, penyewaan, pinjaman, pendaurulangan, penukaran, dan perbaikan atau rekondisi.

Pembenahan infrastruktur dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan pun, lanjut Anas, masih akan difokuskan guna mendukung program pendidikan sembilan tahun. Oleh karenanya pembenahan dan pengembangan akan lebih dititik beratkan pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan salah satu bidang kajian manajemen sekolah atau manajemen pendidikan dan sekaligus menjadi tugas pokok manajer sekolah atau kepala sekolah.

Manajemen sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.

Sarana sekolah menurut Ibrahim adalah semua perangkat peraturan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di

sekolah. Menurut pakar pendidikan mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan yang ditinjau dari beberapa sudut pandang. Pertama, ditinjau dari habis dan tidaknya di pakai, kedua, di tinjau dari bergerak dan tidaknya, ketiga, ditinjau dari hubungan proses belajar mengajar.

Prasarana pendidikan adalah semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Prasarana pendidikan di sekolah bisa di klasifikasikan menjadi dua macam prasarana pendidikan. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, ruang laboratorium, kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi sangat menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, seperti ruang kantor sekolah dan lain-lain.

Secara umum tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah untuk memberikan layanan secara profesional dibidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Agar tujuan dapat tercapai ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan, yaitu pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar.

Kedua, prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus di lakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Ketiga, prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus diselenggarakan oleh personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Kelima, prinsip kekohesifan, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.

2. *Pengembangan penggunaan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten*

Penggunaan sarana prasarana pendidikan di SMP Negeri 1 Pedan Klaten adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung dan secara langsung menunjang proses pendidikan di sekolah menjadi tanggung jawab bersama dalam memanfaatkannya secara baik dan benar, meskipun belum seluruh warga sekolah mampu menggunakannya dengan baik dan benar, misalnya penggunaan buku perpustakaan sekolah, yang dipegang siswa sebagian sudah ada yang sobek, bahkan sebagian halamannya hilang, peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, sebagian retak, bahkan pecah di salah satu sisinya, masih ada yang kotor, belum dibersihkan.

Secara umum tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah untuk memberikan layanan secara profesional dibidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan

secara efektif dan efisien. Agar tujuan dapat tercapai ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip pencapaian tujuan, bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar.

Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana (Sudibyo, 2007: 1)..

Gérard Lassibille, et all (2008:2), tentang *“Expansion of Private Secondary Educati Experience and Prospects in Tanzania”*, mengemukakan bahwa *“After decades of restricting private secondary education, the government of Tanzania embarked on new policies in the mid-1980s to support its expansion. The non-government sector expanded rapidly in response to high excess demand, raising transition rates to secondary education sharply. But the new policies had little impact on student learning or school effectiveness, and were accompanied by widening social inequities and increased competition among schools for teachers and school heads. The findings suggest a possible need to refine the government's policies, for example, through selective subsidies to low-income students, and to schools that offer high-value added education. A fundamental problem faced by all secondary schools, whether government or non-government, is that most students enter Form 1 without a strong foundation for subsequent learning, as evidenced by relatively low scores on the primary school leaving examinations even among the best students who enter sought after places in government schools. Thus, beyond the interventions within secondary education, policies to upgrade learning at the primary level also warrant attention in any strategy to strengthen secondary education”*.

Penelitian di Tanzania tersebut di atas, intinya pada tahun 1980-an membuat kebijakan tentang perluasan sekolah, termasuk di dalamnya pengembangan sarana prasarananya, yang memiliki dampak positif terhadap kompetisi antarsekoh.

Cathal Flynn (2007), tentang *“Developing a Code of Behaviour: Guidelines for Schools”*, mengemukakan bahwa *“The legislation requires Boards of Management, as employers, to provide in as far as reasonably practicable, a safe place of work for employees. The Boards of Management are also required to ensure, as far as reasonably practicable, that students, parents and visitors, who may be on the school premises, are not exposed to risks to their health and safety. The legislation further requires the Boards of Management to conduct their business, as far as reasonably practicable, in ways that prevent improper conduct or behaviour likely to put the safety, health or welfare at work of employees, or the health and safety of students, parents or visitors, at risk.”*.

Penelitian selanjutnya, mengkaji tentang Manajemen perundang-

undangan yang menetapkan tentang kebijakan pemerintah dalam menyediakan arena prasarana sekolah yang layak. Manajemen arena prasarana diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik, jika di dunia usaha (perusahaan) untuk mencapai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja

Selanjutnya, prinsip efisiensi, yaitu penggunaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Prinsip kejelasan tanggung jawab, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus diselenggarakan oleh personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Prinsip kekohesifan, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.

Intinya, penggunaan sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun bagi murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.

Implementasinya dalam pengembangan penggunaan sarana prasarana dapat berlangsung dengan baik, utamanya dalam melaksanakan *back up* data yang semula dilaksanakan sebulan sekali, kini menjadi seminggu sekali, sehingga data dapat diamankan sewaktu-waktu terjadi data rusak atau terkena virus, dan sebagainya.

3. *Pengembangan perawatan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten*

Pengembangan perawatan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk perawatan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan commitment (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang handal, dan semuanya itu didukung sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal diatas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal. Dengan demikian harus ada keseimbangan antara komponen-komponen diatas. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, diperlukan pengelola yang mengerti dan memahami prinsip-prinsip dalam pengelolaan sarana prasarana sekolah untuk tercapainya tujuan pendidikan tertentu.

Victoria (2005:3), tentang "*Professional Learning in Effective Schools*", mengemukakan bahwa "*Professional Learning in Effective Schools*"

outlines a vision for professional learning in Victorian government schools. It unpacks the seven principles of highly effective professional learning, which were identified by the Department of Education & Training in 2004, and describes the conditions that support the implementation of the Principles. The paper will be used to inform the design of teacher learning initiatives at all levels of the system – school, network, region and centre. As a school system, we have a shared responsibility to improve student learning outcomes. We also have a reciprocal responsibility to provide teachers with extended opportunities to build on what they already know about effective learning and teaching.”.

Penelitian tersebut mengkaji tentang pembelajaran profesional di sekolah yang efektif memerlukan dukungan sarana prasarana (alat) yang memadai, mulai dari perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan serta perawatannya, bahkan pengembangannya. Sarana prasarana sebagai suatu system persekolahan dan memperbaiki pembelajaran bagi guru dan siswa

Aaron Benavot, Julia Resnik, and Javier Corrales (2006:), tentang *“Global Educational Expansion Historical Legacies and Political Obstacles”*, mengemukakan bahwa *“Corrales discusses policies that might reinforce the positive incentives for expanding education. These policies, he suggests, should be aimed at boosting the demand for education by reducing the cost of schooling to individual families; building up the capacity of state agencies to deliver education of high quality; generating additional performance indicators to improve the efficiency of educational delivery; containing opposition to educational expansion by compensating those most directly threatened; and strengthening mechanisms for ensuring accountability of those at all levels of the education system. These are informed and ambitious proposals, and should stimulate necessary discussion.”.*

Penelitian tersebut di atas mendalami tentang perluasan sarana prasarana dalam bidang pendidikan, mendiskusikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan kebutuhan sarana prasarana pendidikan

Hasil sasaran pengembangan sarana dan prasarana antara lain : terwujudnya perbaikan/ pengadaan/ pembangunan gedung, laboratorium dan ruang-ruang sesuai kebutuhan sekolah, terwujudnya perbaikan/ pengadaan/ penambahan peralatan praktik IPA, komputer, olahraga, kesenian, keterampilan, dan lainlain (Rohiat, 2010: 91).

Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan. Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan (Sudibyo, 2007: 17). Pada dasarnya setiap sekolah sudah menyelenggarakan pengembangan perawatan sarana prasarana yang baik dan memadai, seperti SMP Negeri 1 Pedan Klaten, tetapi mekanismenya belum optimal. Ketidaksiplinan dalam penggunaan anggaran, serta penggunaan alat atau bahan habis pakai yang masih boros selalu menjadi fenomena tersendiri. Untuk itu diperlukan kesadaran dan pengelolaan yang efektif menuju keseimbangan antara sistem yang ada antara perawatan sarana prasarana dan sumber dananya agar seimbang.

Menurut Nedehe (2010:1) mengemukakan bahwa mengelola dan mengembangkan sarana prasarana sekolah menjadi maju dan bermutu terletak pada mutu warga sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, masyarakat serta iklim dan kultur disekitarnya. Untuk mengelola sekolah, diperlukan kepala sekolah yang dapat mengatur seluruh potensi sekolah agar berfungsi dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah. Dalam realitanya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di Thailand masih kurang perhatian dari pemerintah Thailand sendiri salah satu alasan dikarenakan oleh jumlah penduduk Thailand yang beragama Islam sangat minoritas. Realita tersebut menimbulkan sebuah masalah yaitu kurang berkembangnya sekolahsekolah Islam di Thailand dibanding dengan sekolah-sekolah Islam di Thailand. Untuk mengatasi masalah tersebut maka timbullah sebuah solusi dengan mengkaji kembali peranan kepala sekolah dalam pengembangan sarana prasarana lembaga pendidikan Islam dengan memfokuskan obyek penelitian di sekolah Amanasak, Pattani, Thailand.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengembangan pengadaan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten sekolah yang efektif adalah responsif terhadap perubahan program pengiriman pendidikan, dan minimal harus menyediakan lingkungan fisik yang nyaman, aman, aman, mudah diakses, penambahan sepuluh unit komputer untuk laboratorium komputer, delapan unit untuk laboratorium bahasa, satu unit untuk admonistrasi, dan sebagainya; 2) Pengembangan penggunaan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya, termasuk membersihkan semua alat dan media pembelajaran dan perkantoran; dan 3) Pengembangan perawatan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Pedan Klaten yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang ada, pengembangan pemeliharaan sarana prasarana sekolah dapat ditegaskan dengan model kerjasama internal dan eksternal. Secara internal, mengoptimalkan kinerja warga sekolah, dan secara eksternal meaksimalkan *stakeholders*, khususnya orangtua atau wali siswa, komite sekolah, dunia usaha, dan pemerintah, termasuk *back up* data yang semula satu bulan sekali dilaksanakan satu minggu sekali.

Saran

Berdasarkan temuan maupun kekurangan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1) Bagi pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru hendaknya membuat komitmen dan menindaklanjutinya tentang pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana sekolah secara profesional dan proporsional, agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana kerja sekolah; 2) Bagi pemerintah, hendaknya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para kepala sekolah dan guru terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana sekolah,

bahkan menyediakan tenaga ahli khusus yang dibutuhkan sekolah, seperti laboran, pustakawan, teknisi, dan programmer komputer yang hingga saat ini belum dimiliki sekolah.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Dosen Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan keluarga besar SMP Negeri 1 Pedan Klaten yang telah memberikan dukungan dan motivasinya dalam penelitian.

Daftar Pustaka

- Aaron Benavot, Julia Resnik, and Javier Corrales. 2006. "Global Educational Expansion Historical Legacies and Political Obstacles". American Academy of Arts and Sciences
- Bogdan, Robert C and Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education*, Toronto: Allyn and Bacon.
- Bridget Somekh, et all. 2007. "Evaluation of the Primary Schools Whiteboard Expansion Project-summary report", <http://www.becta.org.uk>
- Cathal Flynn. 2007. "Developing a Code of Behaviour:Guidelines for Schools". Copyright © 2008, National Educational Welfare Board,
- Depdiknas. 2006. Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Expansion Historical Legacies and Political Obstacles". American Academy of Arts and Sciences
- Gérard Lassibille, et all. 2008. "Expansion of Private Secondary Education Experience and Prospects in Tanzania". Institut de
- Gibson, Donnelly & Ivancevich, 1997, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Glickman, C.D., Gordon, S.P., and Ross-Gordon, J.M. 2007. Supervision and Instructional Leadership A Development Approach. Seventh Edition. Boston: USA.
- Gorton, R.A. 1991. *School Administration: Challenge and Opportunity for Leadership*. Dubuque, Iowa : Wm.C. Brown Company Publishers.
- Isjoni. 2006. *Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lackney Jeffery A. & Picus. Lawrence O. 2010. Schools, Facility, Construction, and Educational. <http://education.stateuniversity.coM>
- Moeleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E. 2009. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Russ Media.
- Nedeha, Abdunioh A. 2010. Peranan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Sarana Prasarana Lembaga Pendidikan Islam di Sekolah Amanasak, Pattani,Thailand). <http://Digilib UIN Malang. lib.uin-malang.ac.id>.
- Recherche sur l'Economie de l'Education Centre National de la Recherche Scientifique 9 Avenue Alain Savary

- Rivai, Veithzal. 2004. *“Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan”*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Robbins, S.P.2008. *The Truth about Managing People*. Second Edition. Upper Sadle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Rohiat, 2010. *Manajemen Sekolah : Teori Dasar dan Praktik*. Bandung : Refika Aditama.
- Sallis, Edward.2010. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan* terjemahan Ahmad Ali Rasidi). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sudibyo, Bambang. 2007. *Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum*. Jakarta : Depdiknas.
- Sudrajat, Akhmad. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran dalam Paradigma Baru*. Yogyakarta: Paramitra Publishing.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional (Tinjauan dari Perpsektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta : Kompas.
- Victoria. 2005. “Professional Learning in Effective Schools”. Published by Leadership and Teacher Development Branch Office of School Education Department of Education & Training Melbourne,
- Wilson. 2007. Strategic Facilities and Infrastructure Planning. <http://www.decisionlens.com>
- Yusufhadi, Miarso, 2010. *Sarana dan Prasarana Sekolah Model Unggulan di DKI Jakarta*. <http://www.duniaguru.com>.
- Zaini, Muhammad. 2006. *Pengembangan Kurikulum: Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*. Surabaya: eLKAP.